



PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT¹

THE IMPACT OF FISCAL DECENTRALIZATION ON ECONOMIC GROWTH AND SOCIAL WELFARE

Bambang Saputra

STIE Madani Balikpapan
Jl. Kapt. P. Tendean No. 60 Balikpapan
Email: poetracc@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to examine the effect of fiscal decentralization on economic growth and social welfare. Samples of the research were districts / cities by province in Indonesia except Jakarta. This research is utilizing secondary data from Central Statistics Agency within period from 2005 until 2011. Data were analyzed by applying structural Equation Modeling (SEM) through AMOS program. Results of the research indicate that first, fiscal decentralization has negative and significant effect on economic growth; second, economic growth has positive and significant impact on social welfare; and third, fiscal decentralization has positive and significant impact on social welfare.

Keywords: *fiscal decentralization, economic growth, social welfare.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sampel penelitian adalah kabupaten/kota berdasarkan provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2005 sampai 2011. Data kemudian dianalisis dengan *Structural Equation Modeling* (SEM) melalui program AMOS. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa, pertama, desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketiga, desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat.

¹ Naskah diterima pada 8 Januari 2013, revisi pertama pada 18 Maret 2013, disetujui terbit pada 20 April 2013



A. PENDAHULUAN

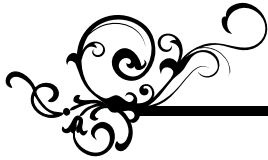
Perdebatan tentang desentralisasi mencakup banyak isu. Dalam kaitannya dengan manajemen makroekonomi menurut Simanjuntak (2010), isu-isu kunci yang menonjol adalah pengaruh desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan, inflasi, serta pelayanan publik. Sebagian ekonom percaya bahwa desentralisasi fiskal mendorong pertumbuhan, memperbaiki pemerataan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Sebagian lain meyakini bahwa desentralisasi mungkin dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, meski prosesnya cenderung menyulitkan manajemen makroekonomi, memperlambat pertumbuhan, meningkatkan ketidakmerataan dan ketimpangan, serta memperburuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan bersifat ambiguitas itu tak lepas dari ciri desentralisasi fiskal yang multidimensi.

Isu desentralisasi fiskal sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah menarik perhatian banyak ahli, seperti Oates (1993); Bird (1993); Bird, Ebel, dan Wallich (1995); Martinez dan McNab (2001); World Bank (1997a); Bahl dan Linh (1992); dan Gramlich (1993). Mereka menyatakan bahwa dengan diserahkannya beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga dengan tegas dijelaskan oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Prud'homme (1995), Peterson (1996),

Zang dan Zao (1995) dalam penelitiannya di Amerika Serikat, Phillips dan Woller (1997) dan Davodi dan Zao (1998) untuk kasus di negara maju Zang dan Zao (2001) dalam penelitiannya di India, menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Di Indonesia hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2008).

Namun demikian, World Bank (1997a), Martinez dan McNab (2001) mengingatkan bahwa desentralisasi fiskal dapat juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal dapat mendorong ke arah ketidakstabilan ekonomi makro, yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sebab desentralisasi fiskal dapat mengurangi pengeluaran pemerintah dan pajak yang berbasis pada pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi stabilitasi. Kemudian juga dengan tegas mengenai pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh beberapa penelitian di antaranya, Phillips dan Woller (1997) dan Davodi dan Zao (1998) untuk kasus di negara-negara berkembang, serta Zang dan Zao (2001) dalam penelitiannya di China. Di Indonesia hal ini juga konsisten dengan penelitian Swasono (dalam Simanjuntak, 2010).

Dalam kaitannya mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, berdasarkan penelitian yang dilakukan Lindahman dan Thurmaier (2002) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap



kesejahteraan masyarakat (pencapaian kebutuhan dasar bagi masyarakat). Hal ini sesuai dengan argumentasi di mana desentralisasi fiskal akan membuat pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Namun, walaupun desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain juga dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, misalnya ketimpangan antar daerah, ketidakstabilan makroekonomi, dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini akan dikaji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan penggabungan dua isu ekonomi-sosial desentralisasi fiskal di atas, untuk kasus di Indonesia. Kendatipun perdebatan dan manfaat dari desentralisasi fiskal di Indonesia masih terus berlangsung yang cenderung ambigu membawa kita pada sejumlah pertanyaan. Sudah tepatkah proses desentralisasi di Indonesia? Apakah Indonesia sudah *on the right track*? Kini timbul harapan besar bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia akan memberi manfaat seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

B. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa studi menyoroti pengalaman negara-negara tertentu dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan

ekonomi (lihat Bird dan Vaillancourt, 2000). Namun, harus diakui juga bahwa dasar teoritis yang menjelaskan kedua hubungan tersebut saat ini sedang dikembangkan dan banyak menjadi perdebatan di antara para ahli dalam berbagai literatur teoritik dan empirik.

Penelitian Oates (1993), Martinez dan McNab (2001) menghasilkan, desentralisasi fiskal dapat mendorong efisiensi ekonomi dan secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Mereka berargumen bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena daerah mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing. Jadi menurut pandangan ini pemerintah daerah dipercaya dapat mengalokasikan dana kepada sektor ekonomi secara efisien daripada dilakukan pemerintah pusat. Tetapi, tidak akan terjadi jika desentralisasi fiskal tidak berjalan secara efektif (Martinez dan McNab, 2001).

Sejalan juga dengan penelitian tersebut, penelitian Bird (1993), Bird dan Wallich (1993), Bahl dan Linh (1992), Gramlich (1993), dan Zang dan Zou (1998) berargumen bahwa desentralisasi penerimaan dan pengeluaran merupakan jalan untuk meningkatkan efisiensi di sektor publik, mengurangi defisit anggaran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendapat ini didasari bahwa pemerintah daerah akan lebih tepat dalam memenuhi kebutuhan daerah daripada pemerintah pusat. Hal yang senada juga dihasilkan pada penelitian Prud'homme (1995) dan Peterson (1996) yang meyakini bahwa



desentralisasi fiskal dapat berdampak positif terhadap pengembangan perekonomian daerah di masa mendatang. Martinez dan McNab (2001) melakukan kajian literatur dan berargumen bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi ekonomi. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Aschaur (1989) dan Barro (1990).

Zhang dan Zao (2001), meneliti tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat provincial yang diaplikasikan di China dan India dan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di China, sedangkan untuk India, desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Zhang dan Zou (1998), juga menemukan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal berdampak pada semakin rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah China dalam 15 tahun terakhir.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian Davodi dan Zao (1998), Phillips dan Woller (1997), menyimpulkan dengan tegas bahwa terdapat pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah untuk kasus di negara-negara berkembang, sedangkan untuk kasus negara maju menunjukkan hasil sebaliknya di mana terdapat pengaruh positif. Davodi dan Zou (1995), menemukan pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Penelitian yang dilakukan oleh Philips dan Woller (1997), menemukan hal yang berbeda bahwa desentralisasi fiskal tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kasus

negara-negara maju, sementara itu untuk negara-negara sedang berkembang mereka gagal untuk menjelaskan dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut World Bank (1997b), desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung. Ada tiga mekanisme dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Argumentasi pertama mengatakan bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi di sektor pengeluaran pemerintah, jadi efek dinamis ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ada hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Argumentasi kedua, bahwa desentralisasi akan menyebabkan instabilitas makroekonomi, sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian terdapat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Dan argumentasi ketiga, mengatakan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan berbeda dengan negara maju dan berkembang. Bagi negara berkembang keuntungan-keuntungan dari desentralisasi ini tidak begitu dirasakan. Pendapat ini didasari karena kelembagaan di negara berkembang tidak memberikan intensif kepada pemerintah daerah untuk menggunakan informasi berkaitan dengan konstituennya. Pemimpin mungkin ditunjuk berdasarkan kekuasaannya. Alasan lain adalah bahwa pemerintah daerah di negara berkembang mungkin tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup dan lemahnya skill sumber daya manusia dalam mengelola anggaran.



World Bank (1997a), Martinez dan McNab (2001), kemudian juga mengingatkan bahwa desentralisasi fiskal dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal dapat mendorong ke arah ketidakstabilan ekonomi makro, yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sebab desentralisasi fiskal dapat mengurangi pengeluaran pemerintah dan pajak yang berbasis pada pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi stabilitas.

Di Indonesia, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi telah dijelaskan oleh beberapa penelitian. Brodjonegoro (2006), misalnya, menegaskan bahwa dalam lima tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskal, sulit untuk disimpulkan apakah desentralisasi berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyebabnya adalah, selama periode tersebut, terjadi pemulihan ekonomi yang kemungkinan besar disebabkan oleh stabilitas makroekonomi nasional. Indikasi lain yang terlihat cukup jelas adalah bahwa kawasan Indonesia Bagian Barat (IBB) tumbuh lebih cepat dibanding Indonesia Bagian Timur (IBT), meski perekonomian Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan tercepat. Juga ada indikasi kesenjangan fiskal antardaerah memasuki era desentralisasi tampak kian memburuk, meski ini sudah dicoba dinetralisasi dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun-tahun berikutnya.

Penelitian Swasono (dalam Simanjuntak, 2010) yang mengaitkan hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah juga

mememukan fakta menarik. Menurutnya, desentralisasi penerimaan ternyata cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi tersebut mencakup periode 15 tahun ini, yakni 10 tahun sebelum pelaksanaan dan 5 tahun di dalam era desentralisasi, cukup valid untuk mengukur *ex post-impact*. Dia menambahkan bahwa karena desentralisasi itu sesuatu yang dinamis, maka 10 tahun ke depan dampaknya bisa sangat berbeda. Selain itu, desentralisasi menyangkut banyak aspek yang masing-masing memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda untuk mendukung dampak positifnya.

Berbeda dengan Brodjonegoro (2006) dan Penelitian Swasono (dalam Simanjuntak, 2010), penelitian Wibowo (2008) dengan menggunakan estimasi panel *fixed effect*, hasil penelitian ini menegaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah selama periode 1999-2004. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa era baru desentralisasi fiskal yang diluncurkan sejak tahun 2001 ternyata memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pembangunan daerah dibandingkan dengan rezim desentralisasi fiskal sebelumnya. Hal ini kemudian juga diperkuat oleh pendapat Simanjuntak (2010) yang menegaskan bahwa potret perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun memang sejalan dengan peningkatan sumber-sumber pendanaan daerah, karena desentralisasi fiskal.

Pada penelitian ini justifikasi yang peneliti ambil adalah bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong



efisiensi dan efektifitas ekonomi serta secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam artian desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa penelitian diantaranya: Aschaur (1989), Barro (1990), Bahl dan Linh (1992), Bird (1993), Bird dan Wallich (1993), Oates (1993), Gramlich (1993), Prud'homme (1995), Peterson (1996), World Bank (1997b), Zang da Zou (1998), Bird dan Vaillancourt (2000), Martinez dan McNab (2001), serta penelitian di Indonesia seperti penelitian Wibowo (2008) dan Siamanjuntak (2010) memberikan kesimpulan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian dirumuskanlah hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan akhir dari kebijakan dan kegiatan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi, yang berarti implementasi kebijakan dan perluasan kegiatan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Sementara itu, menurut Boediono (2009: 29), stabilitas ekonomi adalah satu-satunya cara untuk melindungi agar penghasilan masyarakat yang kita upayakan meningkat tidak digerogeti oleh

keanikan harga. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi besama-sama adalah kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat kemudian juga didukung dengan hipotesis "*trickle down effect*" (dampak merembes ke bawah) yang melekat pada "*growth paradigm*" yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menetes ke kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) (lihat Kuncoro, 2004: 116). Bhalla (1994) membawa perspektif lain yang menghubungkan antara demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia). Ia menemukan pengaruh positif demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, sebuah rezim demokratik cenderung lebih melindungi property dan hak kontrak yang sangat penting untuk berjalannya mekanisme pasar yang didorong oleh sektor swasta. Menurut Kuncoro (2004: 117) walaupun Bhalla tidak secara langsung meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) dengan membalik sebab akibat, penemuannya mengimplikasikan hipotesis "*trickle down effect*" terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhatiannya adalah pada daya tahan demokrasi. Ketika demokrasi berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan cepat dan akan menetes pada kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia).

Dalam perspektif makroekonomi hubungan tersebut



dijelaskan oleh Mankiw (2007: 536-537) dengan menyatakan bahwa, "Dalam jangka panjang, kapasitas negara untuk memproduksi barang dan jasa menentukan standar hidup penduduknya." Mankiw menjelaskan salah satu ukuran kesejahteraan ekonomi terbaik adalah PDB. PDB riil mengukur output barang serta jasa total perekonomian dan karena itu, kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para penduduknya. Negara dengan PDB lebih tinggi memiliki hampir segalanya lebih baik: rumah-rumah yang lebih besar, lebih banyak mobil, lebih banyak penduduk melek huruf, perawatan kesehatan yang lebih baik, harapan hidup yang lebih panjang, dan lebih banyak koneksi internet.

Berbeda dengan hipotesis "*trickle down effect*", Barro (1991) menemukan hubungan sebab akibat antara tingkat kematian bayi dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang juga sejalan dengan teori "*human capital*". Dengan menyusun hubungan tersebut, Barro (1991) menolak hipotesis "*trickle down effect*" yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) hanya dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Lindahman dan Thurmaier (2002) meneliti tentang dampak

desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pencapaian masyarakat atas kebutuhan dasar (*basic needs*), yaitu pendidikan yang lebih baik dan penduduk yang sehat. Mereka menggunakan variabel desentralisasi penerimaan dan pengeluaran untuk melihat variabel desentralisasi dan *human development index* untuk melihat *basic needs*. Hasil kajian empirik menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pencapaian kebutuhan dasar bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan argumentasi di mana desentralisasi fiskal akan membuat pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Namun, walaupun desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain juga dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, misalnya ketimpangan antar daerah, ketidakstabilan makroekonomi, dan sebagainya.

Di Indonesia, penelitian yang menjelaskan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat diantaranya Hirawan (2005) menyatakan bahwa Indonesia mengalami perbaikan cukup signifikan dalam berbagai aspek di era otonomi daerah. Di bidang pendidikan, misalnya, dorongan pemerintah pusat untuk membangun sekolah-sekolah di setiap daerah telah meningkatkan tingkat pendaftaran (*enrollment rate*) cukup tinggi. Berbagai indikator di bidang kesehatan masyarakat juga menunjukkan adanya perbaikan /peningkatan selama beberapa tahun terakhir; belanja publik secara riil untuk kesehatan dari tahun 2001-2006 naik hampir 100%. Juga Simanjuntak



(2010) menegaskan bahwa potret perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun memang sejalan dengan peningkatan sumber-sumber pendanaan daerah, karena desentralisasi fiskal.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *explanation* dengan *hypotheses testing*, yang bertujuan menguji model hipotetik.

Populasi, Sampel dan Data Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sampelnya adalah kabupaten/kota berdasarkan provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta. Pengecualian tersebut dilakukan karena wilayah kota dan kabupaten di DKI Jakarta bukan merupakan daerah otonomi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wilayah kota dan kabupaten di DKI Jakarta sudah tercakup dalam daftar keuangan pemerintah provinsi.

Data penelitian ini merupakan data sekunder dengan menggunakan bentuk *pooled data* pada periode pengamatan tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, yaitu:

a. Data realisasi pendapatan dan

pengeluaran (APBD) kabupaten/kota berdasarkan provinsi;

b. Data pertumbuhan ekonomi provinsi; dan

c. Data kesejahteraan masyarakat yang menggunakan proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi.

Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

a. Desentralisasi Fiskal

Dalam studi ini, desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah provinsi dalam satuan persen.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun menurut harga konstan tahun 2000, yang dinyatakan dalam satuan persen.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah tingkat layak hidup masyarakat yang diindikasikan oleh kondisi ekonomi dan keadaan sosial masyarakat. Dalam studi ini variabel kesejahteraan masyarakat diproksi dengan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*), yang



dikembangkan sebagai model penelitian untuk mempelajari pengaruh secara langsung dan tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen. Model persamaan sebagai berikut:

$$Y1 = \beta_1 X1 + e \dots\dots\dots(1)$$

$$Y2a = \beta_2 Y1 + e \dots\dots\dots(2)$$

$$Y2b = \beta_3 X1 + e \dots\dots\dots(3)$$

$$Y2c = \beta_4 X1 + \beta_1 Y1 + e \dots\dots\dots(4)$$

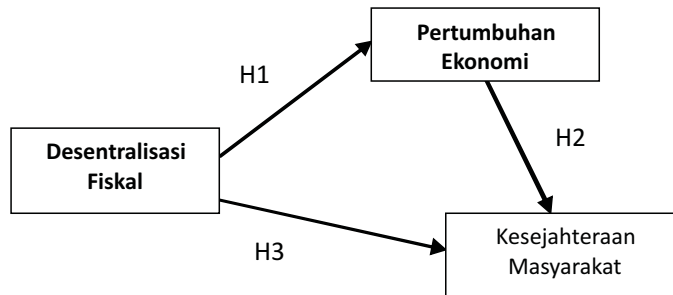
dimana:

X1 adalah desentralisasi fiskal

Y1 adalah pertumbuhan ekonomi

Y2 adalah kesejahteraan masyarakat

e adalah *disturbance term*



Gambar 1. Model Penelitian

Metode Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model (SEM)* dengan menggunakan *software AMOS*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian koefisien jalur secara rinci disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian Koefisien Jalur

Variabel	Koefisien	C.R.	Prob.	Keterangan
Desentralisasi Fiskal (X1) Pertumbuhan Ekonomi (Y1)	-0,125	-2,142	0,021	Signifikan
Desentralisasi Fiskal (X1) Kesejahteraan Masyarakat (Y2)	0,254	2,423	0,012	Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi (Y1) Kesejahteraan Masyarakat (Y3)	0,267	2,487	0,011	Signifikan

Sumber: data diolah (2013)

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, menunjukkan

bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif (-0,125) terhadap pertumbuhan ekonomi atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal, semakin rendah



pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan "desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi" tidak dapat diterima. Hasil studi ini tidak mendukung temuan empiris diantaranya Aschaur (1989), Barro (1990), Bahl dan Linh (1992), Bird (1993), Bird dan Wallich (1993), Oates (1993), Gramlich (1993), Prud'homme (1995), Peterson (1996), World Bank (1997b), Zang da Zou (1998), Bird dan Vaillancourt (2000), Martinez dan McNab (2001), serta penelitian di Indonesia seperti penelitian Wibowo (2008) dan Siamanjuntak (2010).

Namun, berdasarkan pembahasan tinjauan pustaka dan kerangka teori sebelumnya, hasil studi ini mendukung temuan empiris diantaranya: Phillips dan Woller (1997), Davodi dan Zao (1998), yang menyimpulkan dengan tegas bahwa terdapat pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah untuk kasus di negara-negara berkembang; World Bank (1997b) dalam argumentasinya yang kedua menyebutkan bahwa terdapat hubungan negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi; Zhang dan Zao (1998), yang menemukan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal berdampak pada semakin rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah di China dalam 15 tahun terakhir; dan Zhang dan Zao (2001), menyimpulkan bahwa terdapat hasil negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi; serta penelitian di Indonesia oleh Swasono (dalam Simanjuntak, 2010),

menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dijelaskan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh World Bank (1997b) dalam argumentasi kedua dan ketiga. Argumentasi kedua, bahwa desentralisasi akan menyebabkan instabilitas makroekonomi, sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian terdapat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Dan argumentasi ketiga, mengatakan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan berbeda dengan negara maju dan berkembang. Bagi negara berkembang keuntungan-keuntungan dari desentralisasi ini tidak begitu dirasakan. Pendapat ini didasari karena kelembagaan di negara berkembang tidak memberikan intensif kepada pemerintah daerah untuk menggunakan informasi berkaitan dengan konstituennya. Pemimpin mungkin ditunjuk berdasarkan kekuasaannya. Alasan lain adalah bahwa pemerintah daerah di negara berkembang mungkin tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup dan lemahnya *skill* sumber daya manusia dalam mengelola anggaran.

Alasan lemahnya pemerintah daerah dalam mengelola anggaran sehingga menyebabkan pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, menurut penulis dapat dipahami oleh komposisi realisasi belanja APBD, baik provinsi maupun kabupaten/kota pada tabel 6.



Tabel 2. Perbandingan Jenis Belanja APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Daerah di Indonesia, 2005-2011*

Belanja	Provinsi		Kab/Kota		Prov. & Kab/Kota	
	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%	Jutaan Rp	%
Pegawai	22.133.208	20,8	137.572.060	41,95	159.705.268	36,8
Barang dan Jasa	20.061.358	18,85	49.723.886	15,16	69.785.244	16,1
Modal	20.789.212	19,54	75.153.505	22,92	95.942.717	22,0
Lainnya**	43.420.931	40,81	65.474.614	19,97	108.895.545	25,1
Total	106.404.709	100	327.924.065	100	434.328.774	100

Catatan:* = realisasi; ** = bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, pembiayaan daerah, tak terduga, dan lain-lain.
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013 (diolah)

Pada tabel 2 tersebut menyajikan realisasi APBD, baik provinsi dan kabupaten/kota untuk tahun 2005-2011, dirinci berdasarkan empat jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Lainnya. Dengan asumsi belanja yang terkait langsung dengan perbaikan indikator pertumbuhan ekonomi adalah Belanja Modal, maka gambaran yang diberikan oleh tabel tersebut dapat memberikan penjelasan. Dalam periode tujuh tahun terakhir (2005-2011) era desentralisasi fiskal, rata-rata belanja modal provinsi dan kabupaten/kota tidak mencapai sepertiga dari keseluruhan pengeluaran daerah (22,0%). Jumlahnya jauh di bawah Belanja Pegawai yang berada di urutan pertama (36,8%).

Kemudian jika dilihat dari perspektif makroekonomi, terutama pengaruh eksternal ekonomi global, pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat dikarenakan oleh krisis keuangan global pada tahun 2007. Krisis keuangan global telah memberikan tantangan yang luar biasa bagi Indonesia. Keberadaan krisis keuangan global tersebut telah menuntut kemampuan Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya dalam mempertahankan dan menangkap

Foreign Direct Investment (FDI) yang semakin terbatas, juga dalam mempertahankan dan mengembangkan keberadaan kegiatan ekonomi lokal. Krisis keuangan global akan berdampak pada penarikan dana dari perusahaan mereka yang terdaftar di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. *Capital outflow* ini berdampak pada kecenderungan meningkatnya suku bunga. Dari sisi keseimbangan valas, penurunan penawaran dolar ini menyebabkan harga dolar naik dan membawa tekanan depresiatif terhadap Rupiah di Indonesia. Ini tercermin pada dinamika keseimbangan eksternal. Dalam proses selanjutnya, dampak shock akan tersalurkan ke proses aktivitas setiap sektor pada masing-masing perekonomian daerah. (lihat Parewangi, 2009 serta Prasmuko dan Anugerah, 2010)

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil estimasi antara pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif (0,254) terhadap kesejahteraan masyarakat atau dapat dikatakan bahwa semakin



tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan "pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat" dapat diterima. Hasil estimasi ini didukung oleh data, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif tiap tahunnya seiring dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat yang diproksi dengan IPM.

Hasil studi ini mendukung hipotesis "*trickle down effect*" (dampak merembes ke bawah) yang melekat pada "*growth paradigm*" yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menetes ke kesejahteraan masyarakat, Bhalla (1994) yang menghubungkan demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, dan Mankiw (2007: 536-537). Senada sebagaimana yang disampaikan Boediono (2009: 29):

Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Sementara itu, stabilitas ekonomi adalah satu-satunya cara untuk melindungi agar penghasilan masyarakat kita upayakan meningkat tidak tergerogoti oleh kenaikan harga. Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi bersama-sama adalah kunci peningkatan kesejahteraan rakyat.

Hasil ini menimbulkan pertanyaan menarik, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB), untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat? Dalam perspektif makroekonomi, hal tersebut dapat dilihat dengan mengidentifikasi

determinan PDB jangka panjang. Dalam jangka panjang, PDB bergantung pada faktor-faktor produksi yang penting, yaitu: modal, tenaga kerja, dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi meningkat ketika faktor-faktor produksi tersebut meningkat. Pemerintah baik pusat maupun daerah dapat melakukan berbagai kebijakan dengan meningkatkan kapabilitas produktif perekonomian tersebut, misalnya kebijakan yang meningkatkan tabungan nasional atau daerah (baik melalui tabungan publik dan swasta) untuk menghasilkan persediaan modal yang lebih besar; kebijakan peningkatan kualitas pendidikan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja; serta kebijakan untuk terbuka dan memanfaatkan seoptimal mungkin kemajuan teknologi untuk penggunaan modal dan tenaga kerja yang lebih produktif. Kemudian kebijakan lain yang tidak kalah penting yaitu peningkatan kualitas institusi nasional atau daerah untuk dapat memberantas korupsi, meningkatkan akumulasi modal yang lebih besar, dan penggunaan sumber daya perekonomian yang lebih efisien.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil estimasi antara desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif (0,267) terhadap kesejahteraan masyarakat atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal, semakin tinggi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan



"desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat" dapat diterima. Hasil studi ini mendukung teori *fiscal federalism* dan temuan empiris diantaranya Lindahman dan Thurmaier (2002), serta penelitian yang dilakukan di Indonesia seperti Soesilowati, *ed.* (2005), Hirawan (2007) dan Simanjuntak (2010). Hal ini sesuai dengan argumentasi di mana desentralisasi fiskal akan membuat pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya.

Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan desentralisasi Pemerintah Daerah lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal (*local needs and local demand*) sehingga *service delivery* semakin responsif dan mampu mengantarkan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti semakin tinggi desentralisasi fiskal, semakin rendah pertumbuhan ekonomi; pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, yang berarti

semakin tinggi pertumbuhan ekonomi makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat; dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat, yang berarti bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi fiskal yang berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut telah cukup menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia *on the right track*. Namun, hasil tersebut belum menunjukkan suatu hal yang mengembirakan sebab desentralisasi fiskal tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam periode tujuh tahun terakhir (2005-2011) era desentralisasi fiskal, rata-rata Belanja Modal tidak mencapai sepertiga dari keseluruhan pengeluaran daerah dan masih dibawah belanja pegawai.

Berdasarkan hasil simpulan tersebut, implikasi yang dapat diperoleh adalah perlunya reevaluasi pengelolaan keuangan daerah dalam era desentralisasi ini (sebagaimana juga telah disampaikan Fauzi (2010))² dengan prinsip "efektifitas dan efisiensi" tidak lagi "luas, nyata, dan bertanggungjawab," dalam artian bahwa penyelenggaraan desentralisasi bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu berdasarkan hasil pembahasan di atas dalam jangka pendek untuk

2 Menteri Dalam Negeri (2009-2014), Gamawan Fauzi menjelaskan dalam dialog pada majalah Prisma (Vol. 29, Juli 2010), bahwa penyerahan kewenangan tidak lagi berprinsip "luas, nyata, dan bertanggungjawab", tetapi efektif dan efisien. ... Jadi, UU No. 32/ 2004 akan direvisi dan dimodifikasi dengan pendekatan efisiensi dan



memastikan adanya pengaruh positif desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan efisiensi pengeluaran daerah yang berkaitan dengan Belanja Pegawai dan mengefektifkannya untuk Belanja Modal.³ Atau dengan kata lain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus lebih serius mengupayakan bagaimana agar pola belanja daerah bisa efektif dalam mendorong perekonomian daerah. Hal lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah optimalisasi perencanaan APBD dan menghindari keterlambatan penyusunan APBD yang sering terjadi untuk percepatan bergulirnya roda perekonomian daerah.

Kemudian untuk jangka panjang, dikarenakan desentralisasi merupakan fenomena multidimensi dan *multifaceted* (banyak segi), maka desain dan perencanaan dari langkah-langkah pelaksanaannya harus ada dan dibuat secara cermat. Terutama untuk Indonesia yang telah satu dasawarsa pelaksanaan desentralisasi. Perlu ada semacam grand design yang harus diacu oleh para pemangku kepentingan dalam setiap langkah dan tindakan. Menurut Simanjuntak (2010), kita tidak boleh menganggap desentralisasi di Indonesia sudah akan selesai dengan keluarnya PP No. 38/2007, dan sedang direvisinya UU No. 32 dan (menyusul)

UU No. 33 Tahun 2004. Dari kacamata pembangunan ekonomi, pekerjaan yang lebih penting masih menanti, yakni bagaimana mengupayakan Pemerintah Daerah yang sudah lebih mandiri itu mampu menyejahterakan sekaligus menjamin hak-hak politik masyarakat lokal. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan kemudian mentransformasikannya dalam bentuk penciptaan lapangan kerja baru yang akan memperbaiki pendapatan masyarakat merupakan tugas pokok pemerintah daerah di Indonesia. Ini berarti, di masa depan, perlu dilakukan desentralisasi ekonomi (*economic decentralization*) sebagai langkah lanjutan desentralisasi fiskal (Simanjuntak, 2010).

Untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan indikator politik, dan/atau menambahkan indikator sosial-ekonominya. Sebagai contoh indikator politik dapat menggunakan tingkat partisipasi politik masyarakat dan indek persepsi korupsi (IPK), indikator sosial dapat menggunakan indek kemiskinan dan indek pelayanan publik; dan indikator ekonomi dapat menggunakan pertumbuhan APBD dan PDRB Per Kapita. Kemudian dapat juga diteliti berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu baik secara global maupun nasional, sebagai contoh pada saat krisis keuangan global dan pemilihan umum.

3 Misalnya, Belanja Modal yang digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya akan menciptakan suatu lapangan kerja bagi penduduk di daerah tersebut. Hal ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan juga menampung tenaga kerja yang menganggur akibat efisiensi yang dilakukan beberapa perusahaan. Pembangunan infrastruktur juga dapat mendorong minat investor untuk berinvestasi. Mengefisiensikan pengeluaran daerah untuk diefektifkan pada Belanja Modal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat fundamental ekonomi daerah, sehingga daerah dapat terhindar dari dampak eksternal, misalnya krisis keuangan global.



DAFTAR PUSTAKA

- Aschauer, David (1998). "Is Public Expenditure Productive?" *Journal of Monetary Economics*, 23: 177-200
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, dan 2008-2009*. Jakarta: BPS
- Bahl, Roy W. and Johanes Linh (1992). *Urban Finance in Development Countries*. New York: Oxford University Press
- Barro, Robert (1991). "Economic Growth in a Cross Section of Countries". *The Quarterly Journal of Academic*: 407-443
- Bhalla, S. (1994). "Freedom and Economic Growth: A Virtuous Circle". *Nobel Symposium Democracy's Victory and Crisis*. Uppsala University
- Bird, Richard M (1993). "Threading the Fiscal Labyrinth: Some Issues in Fiscal Decentralization". *National Tax Journal* 46 (3): 207-227
- Bird, Richard M., Robert Ebel dan Christine Wallich (1995). "Decentralization of the Socialist State: Intergovernmental Finance in Transition Economics". *Washington DC, World Bank*
- Bird, R. M. dan F. Vaillancourt (2000). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. *terjm*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Boediono (2009). *Ekonomi Indonesia Mau ke Mana? (Kumpulan Esai Ekonomi)*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) Bekerjasama dengan Freedom Institute
- Brojonegoro, Bambang (2006). "Desentralisasi Sebagai Kebijakan Fundamental untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Mengurangi Kesenjangan Antardaerah di Indonesia". Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Fauzi, Gamawan (2010). "Paradigma Kewenangan Daerah yang Efektif dan Efisien". *Prisma*, Vol. 29, No. 3: 74-83
- Gramlich, E. (1993). "A Policy Maker's Guide To Fiscal Decentralization". *National Tax Journal* XLVI, 229-235
- Hirawan, Susiyati Bambang (2007). Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia. Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Kuncoro, Mudrajad (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- Lindaman, Kara dan Kurt Thurmaier (2002). "Beyond Efficiency and Economy: An Examination of Basic Needs and Fiscal Decentralization". *Journal of Public Economics*. The University of Chicago, USA
- Mankiw, N. Gregory (2007). *Makroekonomi*, Edisi VI. *terjm*. Jakarta: Erlangga



- Martinez Vazquez, Jorge M. and McNab, R. (2001). "Fiscal Decentralization, Economic Growth, and Democratic Governance". *Working Paper*, Oktober, 1-41
- Oates, Wallace E. (1993). "Fiscal Decentralization and Economic Development". *National Tax Journal* 46 (3): 237-243
- Parewangi, Andi M. Alfian (2009). "Dampak Krisis Global terhadap Perekonomian Daerah: Aplikasi Model Computable General Equilibrium di Maluku". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 11, No. 4
- Peterson, George E. (1996). "Decentralization in Latin America: Learning through Experience". *Washington DC: World bank*
- Phillips, Kerk. L dan Woller, Garry (1997). "Does Fiscal Decentralization Lead to Economic Growth?" *Working Paper*, No. 97, September, 1-13
- Prasmoko dan Anugrah, Donni Fajar (2010). "Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perekonomian Daerah". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 12, No. 3
- Prud'homme, Remy (1995). "On the Denger of Decentralization". Washington DC, The World Bank, *Policy Research Working Paper*, 1252
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- _____. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- _____. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
- Simanjuntak, Robert A. (2010). "Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi: Urgensi Suatu Grand Design di Indonesia". *Prisma*, Vol. 29, No. 3: 35-57
- Wibowo, Puji (2008). "Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah". *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 5, No. 1, Hal. 55-83
- World Bank (1997a). *The World Development Report*. New York: Oxford University Press
- _____. (1997b). On Line Source Book on Decentralization and Rular Development. Decentralization Thematic Team, SDA
- Zhang, Tao dan Zou Heng-fu (1998). "Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China". *Journal of Public Economics* 67, 221-240
- _____. (2001). "The Growth Impact of Intersectoral and Intergovernmental Allocation of Public Expenditure: with Application in China and India". *China Economics*